



KAJI ULANG (REVIU)

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DJPSDKP // *Hebat*

30 Mei 2019

RINGKASAN

Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019, seiring perubahan organisasi Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2017, telah dilakukan Revisi Dokumen Renstra tersebut dan ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 9/PER-DJPSDKP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/KEP-DJPSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015 – 2019.

Tahun 2018 telah dilakukan reuiu Renstra dengan penyesuaian pada beberapa indikator dan kerangka pendanaanya. Selanjutnya pada tahun 2019, memperhatikan hasil trilateral meeting perubahan Revisi Rencana Kerja Tahun 2019 dan hasil evaluasi Inspektorat II, perlu dilakukan reuiu terhadap Dokumen Rencana Strategis Ditjen. PSDKP. Tujuan reuiu adalah untuk menelaah konsistensi dan relevansi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategis pada lingkup nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan hasil reuiu terdapat perubahan atau penyesuaian pada:

- a) Bab II Visi, Misi, dan Tujuan;
- b) Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada level Eselon I; serta
- c) Lampiran Kerangka Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 pada level Program.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	
DAFTAR ISI	i
BAB I INFORMASI UMUM	2
1.1. Dasar Reviu	2
1.2. Tujuan Reviu	3
1.3. Metode dan Alur Reviu.....	3
1.4. Ruang Lingkup Reviu.....	4
1.5. Data Tim Reviu	4
BAB II URAIAN HASIL REVIU	5
2.1. Refleksi Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019.....	5
2.2. Perubahan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019.....	6
BAB III PENUTUP.....	17

BAB I INFORMASI UMUM

1.1. Dasar Reviu

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- g. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas No. 9 Tahun 2017 tentang tata Cara Penyusunan Renja K/L;
- h. PMK No. 94/PMK.02/2017 tentang Juksunlah RKA-K/L dan Pengesahan DIPA;
- i. Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKj Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri KP Nomor: 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019;
- k. Peraturan Menteri KP nomor: 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 9/PER-DJPSDKP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/KEP-DJPSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015 – 2019
- m. Hasil Rapat Pimpinan lingkup Ditjen PSDKP tanggal 28 Mei 2019;
- n. Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) dalam rangka Pemutakhiran Rencana Kerja KKP Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019;
- o. Surat Inspektur Jenderal KKP u.p. Inspektur II Nomor: 3977/ITJ/HP.440/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Hal: Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Unit Eselon I Ditjen. PSDKP;

1.2. Tujuan Reviu

Reviu Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 bertujuan untuk:

- a) Menelaah konsistensi dan relevansi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
- b) Melakukan penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategis pada lingkup nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Ditjen. PSDKP.

1.3. Metode dan Alur Reviu

Reviu Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 merupakan suatu proses evaluasi yang senantiasa dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang di dalam konsepnya disebut sebagai evaluasi *on-going* atau evaluasi pada periode perencanaan berjalan. Jenis evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formulasi yang menelaah sejauh mana formulasi desain kebijakan, program, dan kegiatan telah menggunakan metode yang benar berdasarkan prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga metodologi evaluasi yang digunakan adalah metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman proses agar desain kebijakan, program, dan kegiatan pada Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 dapat dielaborasi secara sistematis dan terstruktur.

Namun demikian ada satu kaidah khusus yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Rencana Strategis K/L sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 bahwa setiap K/L sangat diharapkan untuk tidak melakukan perubahan Renstra K/L yang telah ditetapkan. Perubahan atau revisi Renstra K/L berjalan dapat dilakukan sepanjang:

- a) Terdapat UU yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau
- b) Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L;
- c) Perubahan Renstra K/L tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 meliputi:

- a) Bab II Visi, Misi, dan Tujuan
- b) Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada level Eselon I; serta
- c) Lampiran Kerangka Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 pada level Program.

1.5. Data Tim Reviu

Pengarah:

Plt. Direktur Jenderal PSDKP

Penanggung Jawab:

1. Ketua: Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
2. Anggota: Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Penyelia:

1. Ketua: Plt. Kepala Bagian Program
2. Anggota: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Data

Tim Penyusun:

1. Ketua: Purwono Budi Santoso (Perencana Muda)
2. Anggota: Samsu Muarip (Perencana Pertama), Lucky Rizki Rachmadi, Harfy B. Alia, Bambang Suseno, Ena Marlina, Liva Junaidi dan Tri Susilowati

BAB II URAIAN HASIL REVIU

2.1. Refleksi Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019

Capaian kinerja Ditjen. PSDKP sampai dengan tahun 2018 yang tercermin pada pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku; Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI); serta Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) yang disidik secara akuntabel. Capaian kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan IV tahun 2018 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Ditjen. PSDKP 2015 - 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN (TAHUN)							
	2015		2016		2017		2018	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70	82,91	73	79,70	76	93,57	81	96,38
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	56,25	24,31	13,41	28,50	59,86	71,05	66,49	67,63
Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel (%)	82	93,29	85	85,29	87	92,02	90	93,44

IKU Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dibentuk oleh beberapa Sub IKU, yaitu:

- Persentase Kelautan Pelaku Usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan;

d) Persentase Ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantaun kapal perikanan.

Berdasarkan data capaian Tabel 2.1, IKU ini selalu melampaui target bahkan pada beberapa kasus di UPT hingga melampaui angka capaian 100%. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang positif dalam hal pencapaian kinerja namun demikian tetap perlu menjadi perhatian untuk dibedah secara lebih mendalam berkenaan dengan definisi, konsep, metode pengukuran, serta penentuan target capaian kinerjanya ysesuai dengan proses bisnis kelautan dan perikanan.

IKU Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) adalah IKU yang menggunakan formula perhitungan dengan variabel hari operasi kapal pengawas, oleh karenanya IKU ini selalu mengalami perubahan target akibat revisi anggaran yang terkait dengan hari operasi kapal pengawas. Dalam konteks penentuan indikator sasaran program (*outcome*), indikator ini lebih tepat dijadikan sebagai indikator sasaran kegiatan (*output*) karena memperoleh dampak langsung dari perubahan input dalam hal ini anggaran hari operasi. Hal ini perlu menjadi pertimbangan di dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Restra PSDKP 2020-2024 agar indikator output tidak diletakkan pada sasaran program.

IKU Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan indikator yang terkait dengan fungsi penegakan hukum. Definisi IKU ini dibatasi pada proses yustisi sejak diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPRINDIK) hingga tahap berkas dinyatakan lengkap (P-21). IKU ini selalu mencapai target sejak tahun 2015 sampai 2018.

2.2. Perubahan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019

Reviu pada Bab II [Visi, Misi, dan Tujuan] terdapat penyempurnaan pada Sub Bab C [Tujuan] di mana tujuan yang ingin dicapai pada periode Renstra 2015-2019 sebagai penjabaran dari visi “Perairan Indonesia bebas *illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab” adalah: “Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019, salah satu kriteria “Tujuan” adalah harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah dimana kata “Meningkatnya” lebih tepat dibanding dengan “Meningkatkan”.

Oleh karena itu Tujuan pada Bab II Renstra Ditjen. PSDKP 2015-2019 diubah menjadi: **“Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”**.

Pada Tahun Anggaran 2019 terjadi perubahan alokasi anggaran dari Rp 1.113.300.000.000,- (Kerangka Pendanaan Jangka Menengah/KPJM) menjadi Rp. 646.521.072.000.000,- (DIPA/KRISNA) dengan rincian per kegiatan sebagaimana Tabel 2.2. Perubahan alokasi anggaran ini merupakan sesuatu yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kondisi variabel makro ekonomi.

Tabel 2.2 Kerangka Pendanaan Ditjen. PSDKP Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN		2019 (Rp ribu)		UNIT
			KPJM	Update KRISNA	ORGANISASI PELAKSANA
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			1,113,300	646,521,072	
1	Pemantauan dan Operasi Armada	Pemantauan SDKP dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan Pengoperasian Kapal Pengawas	800,885	329,761,297	Dit. Pemantauan dan Operasi Armada
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		104,970	62,144,917	Dit. Penanganan Pelanggaran
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		2,375	13,671,384	Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan		4,475	14,209,595	Dit. Pengawasan Pengelolan Sumber Daya Perikanan
5	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP		200,595	226,733,879	Sekretariat Ditjen. PSDKP

Perubahan pada kerangka pendanaan diikuti pula dengan perubahan pada kerangka kinerja. Anomali terjadi pada IKU Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) di mana IKU ini merupakan indikator *outcome* namun sangat terdampak oleh perubahan anggaran (input). Perubahan pada IKU cakupan pengawasan ini juga perlu

dipertimbangkan mengingat usulan perubahan target yaitu 41,06% sedangkan pada dokumen RPJMN 2015-2019 tertulis target pada akhir periode adalah 84,8%.

Kondisi ini tentu cukup kontradiktif di mana pada satu sisi perubahan alokasi anggaran dari KPJM menjadi DIPA RKA-K/L adalah sesuatu yang lumrah terjadi namun di sisi lain target kinerja pada Renstra K/L diharapkan untuk tidak diubah selama periode RPJMN kecuali dengan syarat:

- a) Terdapat UU yang mengamankan perubahan Renstra K/L; atau
- b) Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L;
- c) Perubahan Renstra K/L tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hal ini perlu menjadi perhatian di dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 serta rancangan pedoman penyusunan dan penelaahan Renstra K/L 2020-2024 bahwa target kinerja yang dimasukkan ke dalam dokumen RPJM dan Renstra K/L dikhususkan untuk target indikator sasaran strategis (*impact*) dan target indikator sasaran program (*outcome*). Sedangkan target indikator sasaran kegiatan (*output*) cukup dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) K/L yang memang berubah setiap tahunnya pada periode RPJM/Renstra berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan fokus pembangunan dari Presiden RI yang disampaikan setiap awal tahun.

Reviu pada Bab IV [Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan] yang menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)*, terdapat penyesuaian karena perubahan pada beberapa indikator kinerja sesuai pedoman dari Biro Perencanaan, dengan rincian sebagaimana Tabel 2.3.

Reviu pada Lampiran Kerangka Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 yang menggunakan pendekatan *logical framework* pada aplikasi KRISNA - Renja K/L juga mengalami beberapa penyesuaian karena perubahan pada beberapa indikator kinerja dengan rincian sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Penyesuaian Target Kinerja Renstra PSDKP 2015-2019 dengan Perjanjian Kinerja Plt. Direktur Jenderal PSDKP Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN						KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019		
						SEMULA	MENJADI	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE								
SS 1. Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan								
1.	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	-	8	8	11	12	11	Arahan Biro Perencanaan, Setjen. KKP
CUSTOMER PERSPECTIVE								
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan								
2.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	73%	76%	81%	87%	87%	tetap
INTERNAL PROSES PERSPECTIVE								
SS 3. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif								
3.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	6	6,5	7,7	7,5	8	7,9	Arahan Biro Perencanaan, Setjen. KKP
4.	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	5	5	5	5	3	Target diturunkan karena belum ada kepastian Pejabat Eselon I definitif
5.	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	2	2	3	3	3	2	Target diturunkan karena belum ada Pejabat Eselon I definitif
SS 4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif								
6.	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	56,6%	13,41%	59,86%	66,49%	70,41%	41,06%	Penurunan nilai pagu anggaran Tahun 2019
7.	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	85%	87%	90%	92%	92%	tetap

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN						KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019		
						SEMULA	MENJADI	
8.	Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	7,5	8	8,5	9	9	9	tetap
9.	Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	-	-	80	90	100	-	Indikator dihilangkan, karena jenis Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen. PSDKP bukan ditujukan ke masyarakat melainkan Awak Kapal Pengawas
<i>LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE</i>								
SS 5. Tersedianya Aparatur Sipil Negara [ASN] DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian								SS 5. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
10.	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	65	77	80	80	85	71	Perubahan nomenklatur (Indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal PSDKP) serta metode penghitungan sesuai arahan Biro SDMA KKP
SS 6. Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses								
11.	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%	50%	65%	70%	100%	80%	Perubahan nomenklatur indikator (Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP) serta perubahan target dari Pusdatin KKP
SS 7. Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima								
12.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	BB	BB	A	A	AA	A (81)	Mengikuti target KKP
13.	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	-	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	tetap
14.	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	-	-	100	100	100	-	Indikator dihapus berdasarkan arahan Biro Perencanaan KKP
15.	Unit kerja yang berpredikat menuju WBK (unit)	-	-	-	-	-	3	Indikator baru dari Inspektorat jenderal KKP
16.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP (%)	-	-	-	-	-	80	Indikator baru dari Inspektorat jenderal KKP

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN						KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019		
						SEMULA	MENJADI	
17.	Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi)	-	-	1	1	1	-	Indikator dihapus berdasarkan arahan Biro Perencanaan KKP
18.	Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A	A (86)	A (89)	A (89)	A (89)	A (87)	Mengikuti target KKP
SS 8. Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel								
19.	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (80)	Baik (83)	Baik (85)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)	Baik (87)	Perubahan nomenklatur dan metode penghitungan indikator (Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP) dari Biro Keuangan KKP
20.	Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	100%	100%	100%	-	-	-	Indikator dihapus berdasarkan arahan Biro Keuangan KKP
21.	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran DJPSDKP TA. 2018 (%)	-	-	-	-	-	1	Indikator baru dari Biro Keuangan KKP

Tabel 2.4 Kerangka Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2019 pada Level Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019		
							Semula	Menjadi	
PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Pertumbuhan PDB Perikanan	-	-	-	-	-	11	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	73%	76%	81%	87%	87%	tetap
	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	7,9	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019		
							Semula	Menjadi	
	perikanan yang efektif	Jumlah kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	-	-	-	-	-	3	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
		Jumlah Draft Peraturan Perundangan (UU, PP, PERPRES,PERMEN) yang diselesaikan	-	-	-	-	-	2	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	56,6%	13,41%	59,86%	66,49%	70,41%	41,06%	Penurunan nilai pagu anggaran Tahun 2019
		Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	85%	87%	90%	92%	92%	tetap

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019		
							Semula	Menjadi	
		Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	9	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	-	-	-	-	-	71	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PSDKP	-	-	-	-	-	80%	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	-	-	-	-	-	A (81)	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019		
							Semula	Menjadi	
		Level Maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP	-	-	-	-	-	3	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
		Unit kerja yang berpredikat menuju WBK	-	-	-	-	-	3	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP	-	-	-	-	-	80%	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
		Nilai AKIP Ditjen PSDKP	-	-	-	-	-	A (87)	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019		
							Semula	Menjadi	
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP	-	-	-	-	-	Baik (87)	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP
		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran DJPSDKP TA. 2018	-	-	-	-	-	1%	Penyesuaian PK Plt. Dirjen. PSDKP

BAB III PENUTUP

Seluruh perubahan pada Reviu Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019 agar dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan program/kegiatan dan anggaran di sisa periode Renstra 2015-2019.

Jakarta, 30 Mei 2019

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Agus Suherman

Paraf :	
1.	Sesditjen :
2.	Kabag Program : 